

Perancangan Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21 Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Mamed Rofendi Manalu¹, Kennedi Tampubolon²

¹Universitas Imelda Medan ²Universitas Budidarma Medan

e-mail: 1endy.budidarma@gmail.com 2kennedi.tampubolon@gmail.com

Abstrak

Sebuah Era baru didalam dunia organisasi muncul sejalan dengan diperkenalkan istilah teknologi informasi dan sistem informasi, yaitu bagaimana sebuah organisasi baik berorientasi dan berinteraksi menggunakan perangkat komputer, aplikasi dan sarana telekomunikasi untuk meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah meliputi masyarakat dunia saat ini. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita tentunya tidak ingin ketinggalan teknologi dan informasi yang sedang berkembang.

Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui perkembangan teknologi yang sedang terjadi. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan komputer sebagai sarana untuk pengolahan data dan informasi. Demikian halnya dengan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang masih banyak mengalami kesulitan dalam pengolahan data pajak tahunan pegawai untuk meminimalkan waktu dan biaya dalam operasionalnya. Oleh karena itu Penulis mencoba membuat Perancangan Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21 Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan visual basic 6.0 dan Ms. Acces, aplikasi ini dapat mengelola data penghitungan pajak dan mengatasi kesulitan yang ada.

Kata kunci— Bakesbangpollinmas, Aplikasi, Pajak

Abstract

A new era in the world of organizations appears in line with the introduction of the terms information technology and information systems, namely how an organization is both oriented and interacts using computer equipment, applications and telecommunications facilities to significantly improve its performance. The development of science and information technology has covered the world community today. As part of the world community, we certainly do not want to miss the technology and information that is developing. There are many ways that can be taken to know the current technological developments.

One way is to use computers as a means for processing data and information. Likewise with the National Political Unity and Community Protection Agency for the North Sumatra Provincial Government which still has many difficulties in processing employee annual tax data to minimize time and costs in its operations. Therefore, the author tries to design an application for calculating the annual income tax article 21 at the National Political and Community Protection Agency for the North Sumatra Provincial Government by using visual basic 6.0 and Ms. Access, this application can manage tax calculation data and overcome existing difficulties.

Keywords— Bakesbangpollinmas, Application, Tax

1. PENDAHULUAN

Seperti halnya negara lain di dunia, Indonesia disamping menyelenggarakan pemerintahan umum juga melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan dana yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan volume dan dinamika pembangunan itu sendiri. Dalam rangka pemenuhan pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri diluar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui penerimaan dari sektor pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara.

Pajak adalah sektor utama sumber penerimaan Negara yang cukup besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran dan belanja dari suatu Negara. Setiap warga Negara yang memiliki penghasilan wajib membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, kemudian dirubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dan terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPH) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri. Untuk itu, sebagai perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib menyetor pajak penghasilan ke kantor Pajak yang telah ditetapkan. Di Indonesia system pemungutan pajak yang digunakan adalah Self Assesment System, yaitu system dimana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. System ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Akan tetapi, wajib pajak sering melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan yang menyebabkan terjadinya pajak yang disetor terlalu besar atau terlalu kecil. Sehingga kantor pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan sehingga terjadi peyetoran pajak yang terlalu besar atau terlalu kecil.

2. METODE PENELITIAN

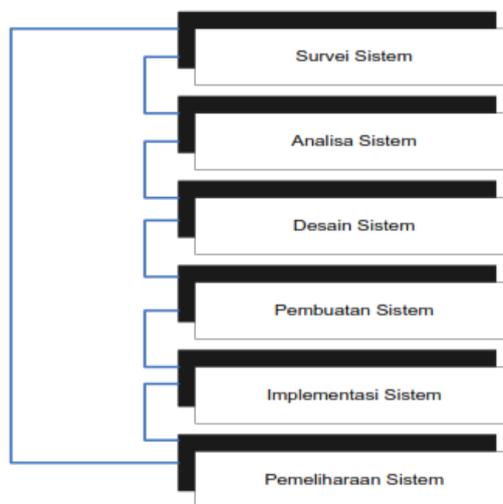
1. Metodologi yang berorientasi keluaran
Metodologi ini disebut juga metodologi tradisional karena dalam tahapan pengembangan sistem tanpa dibekali dengan teknik dan piranti yang memadai, seperti cara menganalisis, menggambarkan sistem, sehingga sering juga disebut Metodologi Sistem Development Life Cycle (SDCL), dimana fokus utama metodologi ini adalah pada keluaran/output seperti laporan penjualan, laporan pembelian dan lain sebagainya.
2. Metodologi yang berorientasi proses
metodologi ini telah dilengkapi dengan alat-alat (tool) dan teknik-teknik yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem, alat yang digunakan antara lain data flow diagram (DFD), dan bagan

terstruktur. Fokus utama metodologi ini pada proses dengan menggambarkan dunia nyata yang memakai data flow diagram.

3. Metodologi yang berorientasi data menggunakan ERD dalam tahap perancangan sistem. Fokus utama dari metodologi ini adalah data, dimana dunia nyata digambarkan dalam bentuk entitas, atribut data serta hubungan antar data tersebut.

2.1 Model Pengembangan Sistem

Adapun skema model pengembangan sistem iterasi adalah sebagai berikut:



2.2. Pengertian sistem

Menurut Aji Supriyanto (2005:238) pendekatan sistem terbagi dua yaitu: Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem yaitu suatu jaringan prosedur, metode, dari cara kerja yang saling berinteraksi dan dilakukan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen-komponennya mendefinisikan sistem yaitu suatu kumpulan elemen baik abstrak maupun fisik yang saling berintegrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.3 Karakteristik Sistem

Suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yaitu:

1. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

2. Batas Sistem

Batas sistem (*boundary*) merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya sehingga menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

3. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar (*environment*) dari sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi sistem baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan.

4. Penghubung Sistem

Penghubung (*interface*) merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya.

5. Masukan Sistem
Masukan (*input*) sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal output*).
6. Keluaran Sistem
Keluaran (*output*) sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat berupa masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem.
7. Pengolah Sistem
Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.
8. Sasaran Sistem
Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*). Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tampilan Menu Utama



Gambar Tampilan Menu Utama

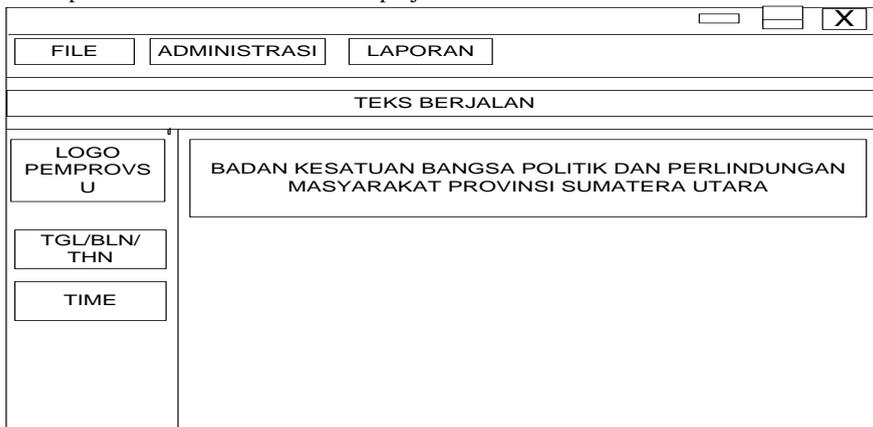
2. Tampilan Tabel Perancangan laporan pajak

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara										
Daftar PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS)										
No.	N I P	Nama Pegawai	Status	Penghasilan Bruto	Pengurang		Jumlah PPh Netto Dibebankan	PTKP	PPh 21 Dibebankan	PPh 21
					Riwayat Jabatan	Toran Pensiun/ JHT				
1										

Medan, 9 Juli 2015

Gambar perancangan laporan pajak

3. Tampilan Menu Utama



Gambar Tampilan Menu Utama

4. Tampilan menu file data pegawai

NIP	1972001072001 03 1 004	TMT/No. SK Awal	28-10-2001
Nama	Hedi Sofyan	TMT/No. SK Akhir	28-07-2015
Golongan/Pangkat	4A Pembina	No. KTP	121400107720002
Jabatan	3A4A Pembina	Tempat Lahir	Medan
Jenis Kelamin	Laki-laki	Tanggal Lahir	01-07-1972
Status Pernikahan	Kawin	Pendidikan	S1
Jumlah Anak	0	Agama	Kristen
Status Wajib Pajak	K/0	Alamat	Jl. Gatot Subroto No.375 Medan
No. NPWP	19720107200100041	No. Telp/HP	081361088787

Gambar Tampilan Menu File Data Pegawai

5. Menu File data golongan

Data Golongan/Pangkat

Kode Golongan : II

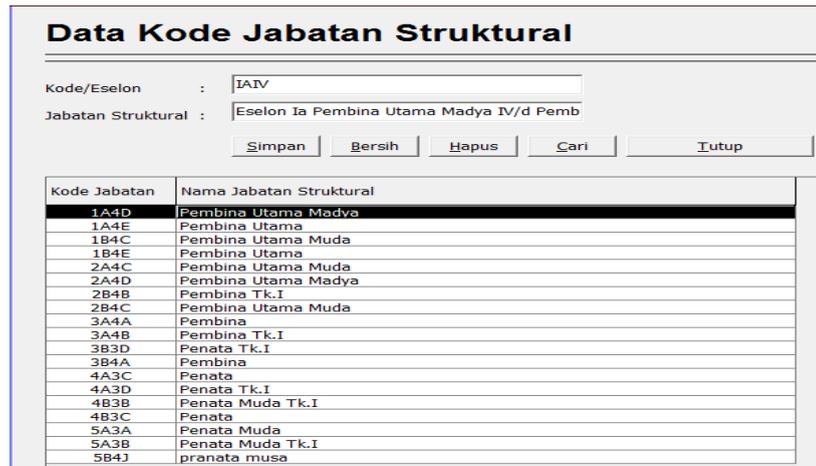
Nama Pangkat : Pengatur Muda Tingkat I

Golongan : II

Ruang : b

Kode Golongan	Nama Pangkat	Golongan	Ruang
1B	Juru Muda Tingkat I	I	b
1C	Juru	I	c
1D	Juru Tingkat I	I	d
2A	Pengatur Muda	II	a
2B	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
2C	Pengatur	II	c
2D	Pengatur Tingkat I	II	d
3A	Penata Muda	III	a
3B	Penata Muda Tingkat I	III	b
3C	Penata	III	c
3D	Penata Tingkat I	III	d
4A	Pembina	IV	a
4B	Pembina Tingkat I	IV	b
4C	Pembina Utama Muda	IV	c
4D	Pembina Utama Madya	IV	d
4E	Pembina Utama	IV	e
1A	Juru Muda	I	a

6. Menu file data jabatan



Data Kode Jabatan Struktural

Kode/Eselon :

Jabatan Struktural :

Kode Jabatan	Nama Jabatan Struktural
1A4D	Pembina Utama Madya
1A4E	Pembina Utama
1B4C	Pembina Utama Muda
1B4E	Pembina Utama
2A4C	Pembina Utama Muda
2A4D	Pembina Utama Madya
2B4B	Pembina Tk.I
2B4C	Pembina Utama Muda
3A4A	Pembina
3A4B	Pembina Tk.I
3B3D	Penata Tk.I
3B4A	Pembina
4A3C	Penata
4A3D	Penata Tk.I
4B3B	Penata Muda Tk.I
4B3C	Penata
5A3A	Penata Muda
5A3B	Penata Muda Tk.I
5B4J	pranata muda

Gambar 4.24 Tampilan Menu File Data Jabatan

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada mengenai Perancangan Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21 pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi, di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dengan menggunakan *Microsoft Access* dan bahasa pemrograman *Microsoft Visual Basic 6.0*, dalam perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21 dapat membantu mengefisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Dalam aplikasi ini administrasi tidak perlu menghabiskan waktu dengan dokumen-dokumen dari setiap Pegawai Negeri Sipil, jika aplikasi yang sudah dirancang ini dapat dimanfaatkan untuk menginput dan mengolah data Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21.

4.2 Saran

Setelah penulis melaksanakan penelitian dan pengumpulan data yang penulis laksanakan di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tepatnya dibidang IV (empat) bagian keuangan dan perpajakan, maka penulis memiliki saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi kelanjutan usaha dan peningkatan etos kerja. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Program ini masih bersifat stand *alone*, diharapkan kedepannya dapat dikembangkan dengan menggunakan sistem berbasis *Network*/jaringan dan multi *user* (banyak Pengguna).
- b. Sistem yang dirancang belum mengkomodir semua kebutuhan pelaporan pajak Tahunan PPh pasal 21, untuk diperlukan pengembangan sistem secara utuh dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Kadir & Terra CH.Triwahy uni. *Pengenalan Teknologi Informasi*. ANDI Yogyakarta. 2003
- [2] Andi Kristanto. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Gava Media. Yogyakarta. 2003.
- [3] Aji Supriyanto. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Salemba Infotek. 2005.
- [4] Al-Bahra bin Ladjamuddin. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2005.
- [5] Davis, Gordon B, *Computer and Information Processing*, McGraw-Hill, 2000.
- [6] Efferin, S., et al. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- [7] Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B. *Fundamentals of Database Systems, Edisi Ketiga*. Addison-Wesley Pub Co. New York. 2000.
- [8] Kusumo, Aryo Suryo Drs., *Buku Latihan Pemrograman Database dengan Visual Basic 6.0*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2002.
- [9] Musanafi, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Haji Masagung, 1989.
- [10] Jogiyanto Hartono. *Analisis dan Disain*, C.V Andi Offset, Yogyakarta. 2001.
- [11] Jogiyanto HM. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan praktek Aplikasi Bisnis*. Andi. Yogyakarta. 2005.
- [12] Kuncoro, Mudradjad. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Jakarta : penerbit Erlangga, 2003.
- [13] Kadir, Abdul, *Konsep dan Tuntunan Praktis Basis Data*, Yogyakarta : Andi, 2000.
- [14] Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003.
- [15] Sugiyono. *Model Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

- [16] Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2001
- [17] Sukardji, Untung. *Sebuah analisis Konstruktif Perubahan Undang-Undang perpajakan Pertambahn Nilai 1984 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- [18] Waluyono dan Ilyas. *Perpajakan Indonesia, Buku Satu*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002